



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 4 September 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020
Ketua Rapat	: H. Iskan Qolba Lubis, M.A
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 25 dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Iskan Qolba Lubis, M.A. dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda membahas "**Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,**" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI **belum dapat menerima** Pagu Anggaran tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp.273.641.802.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) yang mengalami penyesuaian berupa kenaikan sebesar Rp. 37.000.000.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah*) dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 236.641.802.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) dan meminta anggota Banggar Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Banggar DPR RI minimal sama dengan Anggaran Tahun 2019.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menyampaikan kepada Presiden RI agar mengeluarkan Perpres tentang KPPPA sehingga ada Perluasan Tugas dan Fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam hal penyediaan layanan dan rujukan akhir tingkat nasional bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk kebutuhan saat ini dan kedepan.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 diharapkan ada terobosan baru sehingga bisa memberikan solusi, sasaran yang jelas dan pencapaian yang terukur baik dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menyampaikan laporan secara rinci hasil

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A